

Indonesia Economic and Development Outlook 2026

Komoditas Strategis dan Hilirisasi Pertanian sebagai Pilar Transformasi Ekonomi Indonesia

Arif Haryana^{1*}

¹ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Korespondensi: ^{1*} haryana@bappenas.go.id

 <https://doi.org/10.47266/bwp.v9i1.537> | halaman: 53 - 72

Abstrak

Komoditas pangan dan perkebunan memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia, tidak hanya sebagai penyedia kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga sebagai penopang stabilitas makroekonomi, sumber utama penyerapan tenaga kerja, dan motor transformasi struktural. Dalam konteks ketidakpastian global, perubahan iklim, serta volatilitas harga komoditas internasional, penguatan ketahanan pangan dan percepatan hilirisasi pertanian menjadi agenda kebijakan yang semakin krusial. Artikel ini menganalisis peran komoditas strategis dan hilirisasi pertanian dalam kerangka pembangunan Indonesia tahun 2026 dengan mengaitkannya pada agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, review literatur kebijakan dan akademik, serta pembelajaran lintas negara, kajian ini menunjukkan bahwa sektor pangan dan perkebunan berkontribusi signifikan terhadap PDB, stabilitas inflasi, neraca perdagangan, dan pembangunan wilayah perdesaan. Namun demikian, proses hilirisasi masih menghadapi tantangan struktural berupa produktivitas hulu yang rendah, volatilitas harga pangan, serta lemahnya integrasi petani dan UMKM ke dalam rantai nilai industri. Artikel ini menegaskan bahwa hilirisasi pertanian perlu dipahami sebagai strategi transformasi ekonomi yang inklusif, bukan semata industrialisasi berbasis komoditas. Penguatan produktivitas, stabilisasi harga berbasis wilayah, diversifikasi hilirisasi, serta integrasi hulu–hilir menjadi kunci agar komoditas strategis berfungsi sebagai pilar pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Kata Kunci: Komoditas Strategis; Hilirisasi Pertanian; Ketahanan Pangan; Transformasi Ekonomi; RPJMN 2025-2029.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

I. Pendahuluan

Komoditas pangan dan perkebunan menempati posisi yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Perannya tidak hanya terbatas sebagai penyedia kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, penopang stabilitas makroekonomi, sumber utama penyerapan tenaga kerja, serta instrumen penting dalam pengurangan kemiskinan dan ketimpangan wilayah. Dalam konteks global yang ditandai oleh ketidakpastian geopolitik, perubahan iklim, dan volatilitas harga komoditas, relevansi sektor ini justru semakin menguat. Dinamika geopolitik yang dipicu konflik Ukraina-Rusia memicu terjadinya gangguan rantai pasok global dan meningkatnya praktik proteksionisme pangan. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada pasar internasional semakin berisiko, sehingga penguatan basis produksi domestik dan pengolahan bernilai tambah menjadi strategi ketahanan ekonomi yang krusial.

Pada saat yang sama, hilirisasi pertanian memungkinkan negara mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas mentah dengan memperluas sumber nilai tambah, meningkatkan stabilitas pendapatan produsen, dan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam sistem perdagangan global.

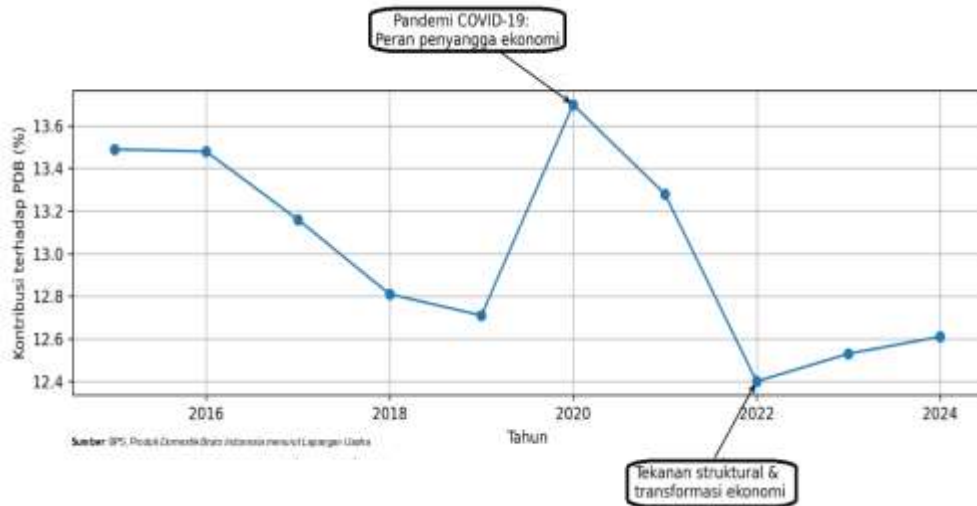
RPJMN 2025–2029, sebagai tahap awal implementasi RPJPN 2025–2045, secara eksplisit menempatkan ketahanan pangan dan hilirisasi sumber daya alam—termasuk pertanian—sebagai pilar transformasi ekonomi nasional. Sejalan dengan itu, RKP 2026 mengusung agenda penguatan kedaulatan pangan dan pengembangan ekonomi produktif dan inklusif.

Bab ini disusun untuk memberikan landasan analitis yang komprehensif mengenai peran komoditas strategis dan hilirisasi pertanian dalam kerangka pembangunan Indonesia tahun 2026. Metodologi yang digunakan dalam bab ini mengombinasikan analisis deskriptif kuantitatif, reviu literatur kebijakan dan akademik, serta pembelajaran internasional (*benchmarking*). Seluruh analisis kemudian disintesis menjadi narasi kebijakan dan rekomendasi strategis yang relevan bagi perumusan arah pembangunan ke depan.

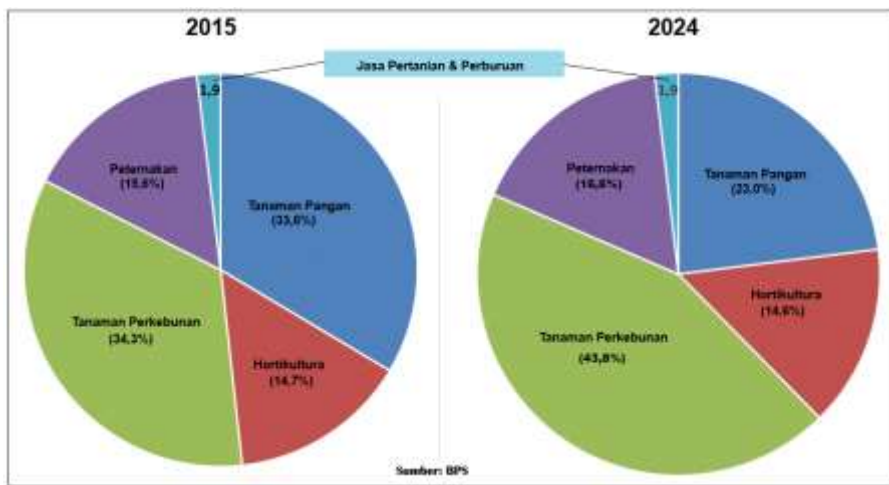
II. Peran Komoditas Pangan dan Perkebunan dalam Ekonomi Nasional

2.1. Kontribusi terhadap Perekonomian Nasional

Secara historis, sektor pertanian merupakan fondasi pembangunan ekonomi Indonesia. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mengalami penurunan relatif seiring dengan transformasi struktural menuju industri dan jasa, namun demikian sektor ini tetap tumbuh positif dan memberikan kontribusi yang signifikan dan stabil. Dalam periode 2015–2024, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB nasional berada pada kisaran 12–14 persen (Gambar 1), dengan subsektor tanaman pangan dan perkebunan sebagai penyumbang utama nilai tambah (Gambar 1).



Gambar 1. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDB Nasional, 2015–2024



Gambar 2. Komposisi PDB Pertanian per Subsektor, 2015–2024

Di samping peran strategis dalam PDB, komoditas pangan memiliki peran sentral dalam pemenuhan pangan dan gizi masyarakat. Beras menjadi pangan pokok utama masyarakat Indonesia dengan kontribusi lebih dari 40% terhadap konsumsi kalori nasional. Stabilitas produksi dan harga beras sangat menentukan daya beli masyarakat serta menjadi faktor penting dalam menjaga inflasi pangan. Oleh karena itu, keberlanjutan produksi beras tidak hanya menyangkut ketahanan pangan, tetapi juga stabilitas sosial dan ekonomi nasional.

Jagung berkontribusi besar sebagai sumber pangan sekaligus bahan baku utama industri pakan ternak, sehingga memiliki keterkaitan erat dengan sektor peternakan. Peningkatan produktivitas jagung mendukung pertumbuhan industri unggas dan daging, yang pada gilirannya memperkuat ketahanan pangan protein hewani. Dengan demikian, jagung berperan sebagai penggerak rantai nilai agribisnis yang memperluas manfaat ekonomi hingga ke sektor industri dan perdagangan.

Komoditas perkebunan, terutama kelapa sawit, gula, kopi dan kakao memegang peran sentral dalam perekonomian nasional sebagai sumber devisa, penopang stabilitas harga pangan, serta penggerak pemberdayaan petani kecil dan UMKM melalui kontribusi ekspor dan penciptaan nilai tambah. (Tabel 7.1)

Kelapa sawit menjadi komoditas perkebunan telah berkembang menjadi komoditas paling strategis dengan keterkaitan ke depan (*forward linkages*) yang luas ke industri pangan, oleokimia, dan bioenergi, serta berperan besar sebagai penyumbang devisa nonmigas terbesar bagi Indonesia. Ekspor produk sawit, baik minyak mentah (CPO) maupun turunannya, memberikan kontribusi signifikan terhadap neraca perdagangan. Selain itu, industri sawit juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, terutama di wilayah sentra perkebunan.

Gula memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga pangan karena sifatnya yang sensitif terhadap inflasi. Produksi gula domestik yang kuat dapat mengurangi ketergantungan impor dan menjaga keseimbangan pasokan. Dengan demikian, gula berfungsi sebagai komoditas penyangga yang memengaruhi langsung daya beli masyarakat.

Kopi dan kakao berkontribusi melalui basis produksi yang didominasi petani kecil dan UMKM, sehingga mendukung pemberdayaan ekonomi lokal. Keduanya juga memiliki nilai ekspor yang cukup tinggi, menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain penting di pasar global. Selain itu, pengembangan industri hilir kopi dan kakao membuka peluang besar bagi peningkatan nilai tambah dan kesejahteraan petani.

Tabel 1. Kontribusi Komoditas Pangan dan Perkebunan Strategis terhadap Ekonomi Nasional

| Komoditas | Kontribusi Utama | Indikator Ekonomi Kunci |
|--------------|-----------------------|--|
| Padi/Beras | Pangan pokok nasional | Pangsa konsumsi kalori >40% |
| Jagung | Pangan & pakan | Keterkaitan kuat dengan industri pakan |
| Kelapa Sawit | Ekspor & devisa | Penyumbang devisa nonmigas terbesar |
| Gula | Stabilitas harga | Sensitif terhadap inflasi pangan |
| Kopi & Kakao | UMKM & ekspor | Berbasis petani kecil |

Sumber: BPS; Kementerian Pertanian; FAOSTAT (diolah).

Dari sisi ketenagakerjaan, sektor pangan dan perkebunan menyerap lebih dari seperempat total tenaga kerja nasional. Karakteristik sektor yang padat karya menjadikannya penopang utama kesempatan kerja di perdesaan dan wilayah tertinggal. Hal ini memperkuat argumen bahwa pembangunan sektor pangan dan perkebunan memiliki implikasi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

2.2. Peran dalam Stabilitas Makroekonomi

Komoditas pangan dan perkebunan memiliki peran fundamental dalam menjaga stabilitas makroekonomi, terutama melalui jalur inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan keseimbangan eksternal. Dalam banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, pangan merupakan komponen utama dalam keranjang konsumsi rumah tangga. Oleh karena itu, fluktuasi harga komoditas pangan—seperti beras, jagung, dan minyak goreng—secara langsung memengaruhi inflasi umum (*headline inflation*). Bank Indonesia dan IMF menegaskan bahwa tekanan inflasi pangan

yang tidak terkendali dapat melemahkan daya beli, meningkatkan kemiskinan, serta memicu ketidakstabilan makroekonomi dan sosial (IMF, 2023; Bank Indonesia, 2022).

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, sektor pangan dan perkebunan berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sektor pertanian dalam arti luas secara konsisten menyerap lebih dari 28–29 persen tenaga kerja nasional, menjadikannya bantalan (*economic buffer*) saat terjadi perlambatan ekonomi atau krisis, seperti pada periode pandemi COVID-19 (BPS, 2021). Literatur pembangunan struktural juga menekankan bahwa stabilitas produksi pangan domestik berperan penting dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi, terutama pada fase awal transformasi ekonomi (Johnston & Mellor, 1961; Timmer, 2009).

Komoditas perkebunan—seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan kakao—memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas neraca perdagangan dan cadangan devisa. Indonesia merupakan salah satu eksportir utama minyak sawit dunia, sehingga kinerja ekspor perkebunan sangat memengaruhi transaksi berjalan (*current account*). World Bank (2022) mencatat bahwa lonjakan harga komoditas global, termasuk produk perkebunan, mampu memperbaiki posisi eksternal negara pengekspor, namun sebaliknya juga menimbulkan risiko volatilitas jika tidak diimbangi dengan diversifikasi dan hilirisasi.

Selain itu, stabilitas pangan dan perkebunan berkaitan erat dengan stabilitas fiskal. Pemerintah sering menggunakan instrumen fiskal—seperti subsidi pangan, cadangan stabilisasi harga, dan intervensi pasar—untuk meredam gejolak harga. FAO (2021) menekankan bahwa kebijakan stabilisasi pangan yang efektif dapat menekan biaya fiskal jangka panjang dengan mencegah lonjakan inflasi dan kebutuhan bantuan sosial yang lebih besar. Namun, ketergantungan berlebihan pada subsidi tanpa peningkatan produktivitas dapat menimbulkan distorsi fiskal dan inefisiensi anggaran.

Secara keseluruhan, peran strategis komoditas pangan dan perkebunan dalam stabilitas makroekonomi bersifat multidimensional: menjaga inflasi tetap terkendali, menopang pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja, memperkuat neraca eksternal, serta mendukung stabilitas fiskal. Literatur kebijakan pembangunan menekankan bahwa kunci keberlanjutan peran tersebut terletak pada peningkatan produktivitas, penguatan rantai nilai, dan integrasi kebijakan pangan dengan kerangka makroekonomi nasional (Timmer, 2015; World Bank, 2020). Dengan demikian, sektor pangan dan perkebunan tidak hanya berfungsi sebagai sektor tradisional, tetapi sebagai pilar strategis stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional.

III. Ketahanan Pangan dan Stabilitas Harga

3.1. Dimensi Ketahanan Pangan dalam RPJMN 2025–2029

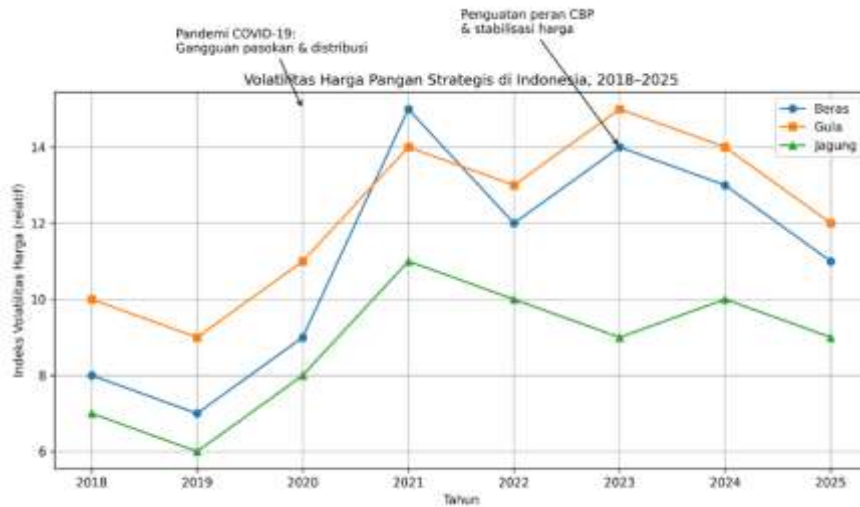
RPJMN 2025–2029 mendefinisikan ketahanan pangan secara multidimensi, mencakup ketersediaan, keterjangkauan, kualitas gizi, dan stabilitas pasokan. Pendekatan ini sejalan dengan kerangka FAO yang menekankan bahwa ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh produksi, tetapi juga oleh akses ekonomi dan distribusi yang efisien.

Indonesia telah mencapai tingkat swasembada relatif pada beras, namun masih menghadapi ketergantungan impor pada beberapa komoditas strategis seperti gandum, kedelai, dan gula. Ketergantungan ini menciptakan kerentanan terhadap guncangan eksternal, terutama dalam situasi krisis global atau gangguan rantai pasok internasional.

3.2. Dinamika Harga Pangan dan Kebijakan Stabilisasi

Volatilitas harga pangan domestik dipengaruhi oleh kombinasi faktor produksi, distribusi, dan kebijakan perdagangan. Variabilitas iklim, keterbatasan infrastruktur logistik, serta ketergantungan impor menjadi faktor utama yang memicu fluktuasi harga.

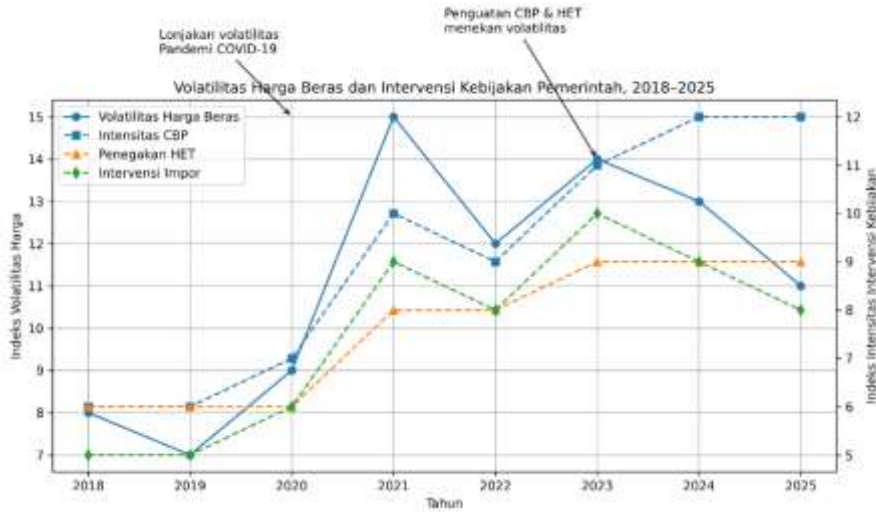
Grafik pada Gambar 3 menunjukkan volatilitas harga beras dan gula yang relatif lebih tinggi dibanding jagung, khususnya pada periode pandemi dan pascapandemi. Temuan ini menegaskan pentingnya kebijakan stabilisasi harga, penguatan cadangan pangan pemerintah, dan koordinasi pusat–daerah sebagaimana diarahkan dalam RPJMN 2025–2029 dan RKP 2026.



Gambar 3. Indeks Volatilitas Harga Pangan Strategis, 2018–2025

Sumber: Badan Pangan Nasional; Bank Indonesia (diolah).

Pemerintah Indonesia menerapkan berbagai instrumen stabilisasi harga beras, antara lain berupa pengelolaan cadangan beras pemerintah (CBP), operasi pasar melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dan kebijakan impor adaptif. Namun, literatur empiris menunjukkan adanya *trade-off* antara stabilisasi harga konsumen dan insentif produksi produsen. Harga yang terlalu ditekan berpotensi melemahkan minat investasi petani dan menghambat peningkatan produktivitas jangka menengah.



Gambar 4. Volatilitas Harga Beras dan Intervensi Kebijakan Pemerintah

Sumber: Badan Pangan Nasional; Bank Indonesia; BPS (diolah).

Gambar 4 menunjukkan bahwa dengan kebijakan stabilisasi harga yang efektif volatilitas harga beras relatif terkendali pada periode pra-pandemi (2018–2019), meskipun kemudian meningkat tajam pada 2020–2021 seiring dengan guncangan pandemi COVID-19. Puncak volatilitas terjadi pada 2021, mencerminkan gangguan simultan pada sisi pasokan (disrupsi produksi dan distribusi) serta sisi permintaan (*panic buying* dan ketidakpastian pendapatan rumah tangga). Pada fase ini, intensitas kebijakan pemerintah—termasuk penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET), intervensi impor, dan program bantuan pangan—juga meningkat secara signifikan, menandakan respons kebijakan yang bersifat reaktif terhadap tekanan pasar yang tinggi.

Memasuki periode 2022–2025, grafik memperlihatkan pola yang lebih stabil: volatilitas harga beras cenderung menurun meskipun intensitas kebijakan tetap relatif tinggi. Hal ini mengindikasikan pergeseran dari kebijakan yang bersifat respons darurat menuju pengelolaan stabilisasi yang lebih sistematis. Penguatan CBP dan konsistensi penerapan HET tampak berperan sebagai jangkar ekspektasi harga, sementara impor digunakan secara lebih terukur untuk menutup kesenjangan pasokan. Secara keseluruhan, grafik ini menegaskan bahwa kombinasi instrumen kebijakan stok, harga, dan perdagangan berkontribusi penting dalam meredam volatilitas harga beras pasca-krisis, sekaligus memperkuat peran negara dalam menjaga stabilitas pangan sebagai bagian dari stabilitas makroekonomi.

Dalam periode 2018–2024 inflasi pangan secara konsisten menjadi determinan utama dinamika inflasi nasional di Indonesia. Pada periode pra-pandemi (2018–2019), inflasi pangan berada di atas inflasi nasional dan turut mendorong inflasi umum mendekati atau melampaui target inflasi 3 persen. Meskipun inflasi nasional menurun pada 2019, kontribusi inflasi pangan tetap signifikan, mencerminkan peran struktural komoditas pangan dalam pembentukan harga konsumen. Memasuki masa pandemi COVID-19 (2020–2021), inflasi nasional berhasil ditekan ke level rendah, namun inflasi pangan kembali meningkat pada 2021 akibat gangguan pasokan dan distribusi. Kondisi ini menegaskan bahwa stabilitas inflasi nasional pada periode tersebut sangat bergantung pada efektivitas pengendalian harga pangan. (Tabel 2)

Tabel 2. Perkembangan Inflasi Pangan dan Inflasi Nasional (%), 2018–2024

| Tahun | Inflasi Nasional (%) | Inflasi Pangan (%)* | Catatan |
|-------|----------------------|---------------------|---|
| 2018 | 3,13 | 3,95 | Inflasi pangan relatif tinggi, mendorong inflasi nasional jauh di atas target 3% |
| 2019 | 2,72 | 3,1 | Penurunan inflasi nasional, kontribusi inflasi pangan masih signifikan |
| 2020 | 1,68 | 2,6 | Pandemi COVID-19, kontrol harga pangan menjadi penting untuk menjaga inflasi rendah |
| 2021 | 1,87 | 3,11 | Inflasi pangan meningkat akibat pasokan terganggu, tetapi inflasi nasional tetap terkendali |
| 2022 | 4,69 | 5,61 | Inflasi pangan tinggi, terutama komoditas utama; memberi kontribusi besar terhadap inflasi nasional |
| 2023 | 3,72 | 7,59 | Inflasi pangan mencapai dua puncak: Februari (7,62%) dan November (7,59%); terhitung sebagai faktor dominan pada inflasi nasional |
| 2024 | 1,54 | 0,12 | Inflasi pangan berhasil ditekan melalui program Gerakan Pangan Murah, distribusi stabilisasi pasokan, dan intervensi pemerintah. Kontribusinya terhadap inflasi nasional sangat rendah. |

*Inflasi pangan diambil dari indeks volatile food sebagaimana dikutip dalam laporan Bapanas dan BPS

Lonjakan inflasi nasional pada 2022 dan tekanan inflasi pangan yang sangat tinggi pada 2022–2023 menandai fase shock harga pangan yang lebih luas, dipicu oleh kombinasi faktor domestik dan global, termasuk kenaikan harga komoditas internasional dan gangguan rantai pasok. Inflasi pangan mencapai puncak ganda pada 2023 dan menjadi faktor dominan pembentuk inflasi nasional, memperkuat argumen bahwa pangan berperan sebagai “*inflation driver*” utama. Sebaliknya, penurunan tajam inflasi pangan pada 2024 hingga mendekati nol menunjukkan keberhasilan intervensi kebijakan pemerintah melalui stabilisasi pasokan dan harga. Dampak langsungnya adalah inflasi nasional yang kembali rendah dan terkendali. Secara keseluruhan, tabel 7.2 mengilustrasikan bahwa pengendalian inflasi nasional di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan pengelolaan inflasi pangan, sehingga kebijakan pangan berfungsi sebagai instrumen kunci stabilitas makroekonomi.

Keberhasilan pengelolaan inflasi pangan tidak terlepas dari penguatan kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), yang merupakan inovasi kebijakan penting dalam arsitektur stabilitas makroekonomi Indonesia. TPIP berfungsi sebagai forum koordinasi lintas kementerian/lembaga (Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pangan Nasional, dan kementerian teknis terkait), sementara TPID menjadi ujung tombak dalam koordinasi implementasi kebijakan di tingkat daerah.

Pendekatan ini menggeser paradigma pengendalian inflasi dari dominasi instrumen moneter menuju kombinasi kebijakan moneter, fiskal, dan struktural berbasis pangan.

Efektivitas TPIP–TPID tercermin dalam beberapa aspek. Pertama, peningkatan koordinasi pusat–daerah memungkinkan respons kebijakan yang lebih cepat terhadap gejolak harga, terutama melalui operasi pasar/SPHP, pengelolaan cadangan pangan pemerintah (CBP), dan fasilitasi distribusi antardaerah. Kedua, pendekatan 4K—ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif—telah menjadi kerangka operasional yang relatif konsisten dalam pengendalian inflasi pangan. Evaluasi Bank Indonesia menunjukkan bahwa daerah dengan TPID yang aktif dan terkoordinasi cenderung memiliki inflasi pangan yang lebih rendah dan lebih stabil dibandingkan daerah dengan kapasitas kelembagaan yang lemah.

Ketiga, TPID berperan penting dalam mengurangi disparitas harga antarwilayah, yang selama ini menjadi sumber utama volatilitas inflasi nasional. Melalui kerja sama antar-daerah (KAD) dan pemanfaatan data neraca pangan, TPID mendorong redistribusi pasokan dari daerah surplus ke daerah defisit. Hal ini sangat relevan bagi komoditas pertanian yang bersifat musiman dan mudah rusak.

Dalam konteks 2026, tantangan kebijakan adalah merancang instrumen stabilisasi harga yang adaptif, berbasis data, dan sensitif terhadap dinamika musim serta perbedaan karakteristik wilayah. Penguatan peran TPID dipandang sebagai instrumen kunci untuk menjaga inflasi dalam sasaran nasional tanpa harus mengandalkan intervensi impor secara berlebihan. Efektivitas TPIP–TPID perlu terus diperkuat agar stabilisasi harga pangan tidak mengorbankan insentif produksi dan agenda hilirisasi. Tantangan utama adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas jangka pendek dan transformasi struktural jangka menengah. Intervensi harga yang terlalu agresif berpotensi menekan harga produsen dan melemahkan investasi pertanian, sementara intervensi yang terlambat dapat memicu inflasi dan gejolak sosial.

3.3. Arah Ketahanan Pangan dan Stabilitas Harga

Memasuki tahun 2026, arah ketahanan pangan Indonesia semakin ditentukan oleh kemampuan negara mengelola risiko pasokan dan harga di tengah ketidakpastian global yang berkelanjutan. Ketahanan pangan tidak lagi semata dimaknai sebagai kecukupan produksi, tetapi sebagai sistem yang mampu menjamin ketersediaan, keterjangkauan harga, dan keberlanjutan pasokan lintas wilayah dan waktu. Dalam konteks ini, penguatan produksi domestik komoditas pangan strategis perlu berjalan seiring dengan peningkatan produktivitas, adaptasi terhadap perubahan iklim, serta pengelolaan cadangan pangan yang lebih responsif. Stabilitas pasokan menjadi fondasi utama untuk meredam tekanan inflasi pangan yang bersumber dari gangguan cuaca ekstrem, dinamika geopolitik, dan volatilitas pasar internasional.

Sejalan dengan itu, stabilitas harga pangan pada 2026 diarahkan melalui kombinasi kebijakan struktural dan intervensi yang lebih terukur. Kebijakan harga tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan konsumen, tetapi juga harus memberikan sinyal yang konsisten bagi petani dan pelaku usaha agar tetap berinvestasi dan meningkatkan kapasitas produksi. Penguatan tata kelola stok, perbaikan sistem distribusi dan logistik pangan, serta peningkatan koordinasi pusat–daerah menjadi kunci untuk meminimalkan fluktuasi harga antarwaktu dan antarwilayah.

Dalam kerangka stabilisasi harga, TPIP–TPID diposisikan sebagai *institutional backbone* stabilitas makroekonomi berbasis pangan. Penguatan sistem data pangan terintegrasi, peningkatan kapasitas TPID di daerah sentra produksi dan daerah rawan inflasi, serta sinergi

yang lebih erat dengan kebijakan hilirisasi pertanian akan menentukan keberhasilan Indonesia menjaga inflasi rendah dan stabil sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan pendekatan tersebut, stabilitas harga dapat dicapai tanpa mengorbankan insentif produksi, sehingga ketahanan pangan nasional menjadi lebih tangguh dan berkelanjutan.

IV. Hilirisasi Pertanian dan Agroindustri

4.1. Hilirisasi Sebagai Strategi Transformasi Ekonomi

Peran pertanian dalam pembangunan ekonomi telah lama menjadi tema sentral dalam literatur transformasi struktural. Teori pembangunan klasik menekankan bahwa pertanian berkontribusi pada pertumbuhan tidak hanya melalui penyediaan pangan dan pasokan tenaga kerja, tetapi juga dengan menghasilkan keterkaitan permintaan dan surplus untuk ekspansi industri (Johnston & Mellor, 1961). Seiring perkembangan ekonomi, pangsa langsung pertanian dalam PDB biasanya menurun. Penurunan ini tidak berarti berkurangnya peran pertanian, tetapi mencerminkan terjadinya transformasi di mana kegiatan pertanian semakin terintegrasi ke dalam rantai nilai industri dan jasa pada sisi hilir (Hayami & Ruttan, 1985; Timmer, 2009).

Lebih lanjut, hilirisasi pertanian memperkuat stabilitas dan ketahanan makroekonomi melalui diversifikasi struktur produksi dan ekspor. Produk hilir pertanian cenderung memiliki elastisitas harga dan permintaan yang lebih stabil dibandingkan komoditas mentah, sehingga mengurangi kerentanan ekonomi terhadap volatilitas harga global. Dari sisi eksternal, hilirisasi meningkatkan nilai ekspor, memperbaiki neraca perdagangan, dan memperdalam keterkaitan sektor domestik (*backward-forward linkages*). Dari sisi fiskal dan ketenagakerjaan, ekspansi industri pengolahan berbasis pertanian menciptakan basis pajak yang lebih luas dan lapangan kerja non-pertanian di wilayah perdesaan. Dalam kerangka makro, hilirisasi pertanian tidak hanya mempercepat transformasi struktural, tetapi juga meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi agar lebih inklusif, berkelanjutan, dan tahan terhadap guncangan.

Dalam konteks Indonesia, hilirisasi pertanian memainkan peran strategis dalam mendorong transformasi struktural dari ekonomi berbasis komoditas primer menuju ekonomi bernilai tambah yang lebih tinggi dan berdaya saing. Selama beberapa dekade, sektor pertanian Indonesia didominasi oleh produksi bahan mentah dengan produktivitas dan nilai tambah yang relatif rendah, sementara kontribusi industri pengolahan hasil pertanian belum optimal. Kebijakan hilirisasi—melalui pengembangan agroindustri, penguatan industri pengolahan pangan, serta integrasi hulu–hilir komoditas strategis seperti padi, kelapa sawit, kakao, kopi, dan tebu—berfungsi sebagai mekanisme transisi yang memungkinkan pergeseran tenaga kerja dari pertanian primer ke kegiatan pengolahan dan jasa terkait dengan produktivitas yang lebih tinggi. Dalam kerangka makro, proses ini mendukung peningkatan pendapatan per kapita, pengurangan kesenjangan desa–kota, serta percepatan transformasi struktural yang lebih inklusif.

Dari perspektif makroekonomi, hilirisasi pertanian berkontribusi langsung pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja non-pertanian di perdesaan. Aktivitas pengolahan hasil pertanian—seperti beras premium, minyak sawit olahan, gula rafinasi, kakao dan kopi olahan—memiliki *multiplier effect* yang lebih tinggi dibanding produksi primer. Studi empiris di tingkat sektoral dan komoditas menunjukkan bahwa pengolahan berbasis pertanian secara signifikan meningkatkan nilai tambah dan meningkatkan daya saing, khususnya pada tanaman pangan dan komoditas perkebunan (Nurhayati & Suryana,

2021; Pramono & Anggraeni, 2020). Studi-studi ini menyoroti pentingnya kapasitas pengolahan, infrastruktur, dan akses pasar dalam meningkatkan keuntungan ekonomi dari pertanian.

Selain menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja di sektor manufaktur dan jasa pendukung, hilirisasi juga memperkuat basis fiskal daerah melalui perluasan aktivitas ekonomi formal. Dalam konteks Outlook 2026, hilirisasi dipandang sebagai mekanisme untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah keterbatasan ruang ekspansi sektor ekstraktif dan meningkatnya tekanan global terhadap komoditas mentah.

Hilirisasi pertanian merupakan instrumen kunci transformasi ekonomi Indonesia dari ketergantungan pada ekspor bahan mentah menuju penciptaan nilai tambah domestik yang lebih tinggi. Dalam struktur ekonomi nasional, komoditas pangan dan perkebunan selama ini berperan besar sebagai penyedia bahan baku, namun kontribusinya terhadap nilai tambah industri, ekspor olahan, dan produktivitas tenaga kerja masih relatif terbatas. Strategi hilirisasi bertujuan memperpanjang rantai nilai di dalam negeri melalui pengolahan pascapanen, agroindustri, dan integrasi dengan sektor logistik serta pemasaran modern. RPJMN 2025–2029 menempatkan hilirisasi pertanian sebagai bagian dari agenda industrialisasi berbasis sumber daya alam dan ekonomi hijau, dengan target meningkatkan nilai tambah, ketahanan pangan, dan daya saing ekspor secara simultan.

Meskipun hilirisasi pertanian dipandang sebagai instrumen kunci transformasi ekonomi, namun setiap komoditas strategis memiliki jalur hilirisasi dan profil dampak ekonomi yang berbeda (Tabel 7.5). Komoditas pangan pokok seperti beras dan gula lebih berperan dalam stabilitas harga dan ketahanan pangan, sementara komoditas perkebunan seperti kelapa sawit, kakao, dan kopi menawarkan potensi nilai tambah dan devisa yang lebih besar. Perbedaan ini menuntut pendekatan kebijakan yang tersegmentasi, di mana insentif hilirisasi disesuaikan dengan karakteristik komoditas, struktur pelaku usaha, dan tujuan pembangunan wilayah sebagaimana diarahkan dalam RPJMN 2025–2029 dan RKP 2026.

Hilirisasi pertanian menghadapi tantangan struktural yang signifikan. Skala usaha petani yang kecil, keterbatasan teknologi pengolahan, akses pembiayaan yang terbatas, serta infrastruktur logistik yang belum merata menjadi kendala utama dalam mempercepat proses hilirisasi. Selain itu, kebijakan stabilisasi harga pangan jangka pendek—seperti penetapan HET atau operasi pasar—sering kali belum sepenuhnya terintegrasi dengan insentif investasi hilir, sehingga berpotensi menekan margin produsen dan pelaku agroindustri. Oleh karena itu, strategi hilirisasi perlu dirancang secara *policy-coherent*, selaras dengan kebijakan ketahanan pangan, perdagangan, dan pengendalian inflasi sebagaimana diarahkan dalam RKP 2026.

Tabel 3. Jalur Hilirisasi Komoditas Pangan dan Perkebunan Strategis Indonesia

| Komoditas Strategis | Tahap Hulu (Produksi Primer) | Tahap Antara (Pengolahan Awal) | Tahap Hilir (Produk Bernilai Tambah) | Dampak Ekonomi Utama | Tantangan Kunci |
|---------------------|------------------------------|--------------------------------|--|--|----------------------------------|
| Padi/Beras | Gabah kering panen | Penggilingan modern | Beras premium, beras fortifikasi, produk turunan | Stabilitas pangan, peningkatan pendapatan petani | Fragmentasi petani, margin tipis |
| Jagung | Jagung pipilan | Pengeringan & grading | Pakan ternak, pati jagung | Substitusi impor, dukung industri peternakan | Fluktuasi harga, logistik |
| Kelapa Sawit | Tandan buah segar | CPO | Oleokimia, bioenergi, pangan olahan | Devisa, nilai tambah tinggi | Isu keberlanjutan, pasar global |
| Gula | Tebu | Gula kristal mentah | Gula rafinasi, produk makanan | Stabilitas harga, industri makanan | Produktivitas tebu rendah |
| Kopi | Biji kopi | Roasting dasar | Kopi kemasan, <i>specialty coffee</i> | UMKM, ekspor niche | Akses pasar, standar mutu |
| Kakao | Biji kakao | Pasta & butter kakao | Cokelat olahan | Ekspor bernilai tambah | Kualitas bahan baku |
| Hortikultura | Buah & sayur segar | Sortasi & cold storage | Olahan beku, jus, <i>ready-to-eat</i> | Penyerapan tenaga kerja | Rantai dingin terbatas |

Sumber: Kementerian Pertanian; Kementerian Perindustrian; FAO; World Bank (diolah).

Ke depan, keberhasilan hilirisasi sebagai strategi transformasi ekonomi sangat ditentukan oleh kualitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat ekosistem agroindustri melalui klaster hilirisasi berbasis wilayah, kemitraan petani–UMKM–industri besar, serta dukungan riset dan inovasi pascapanen. Integrasi hilirisasi dengan agenda pembangunan rendah karbon dan ekonomi sirkular juga membuka peluang nilai tambah baru, khususnya untuk komoditas perkebunan.

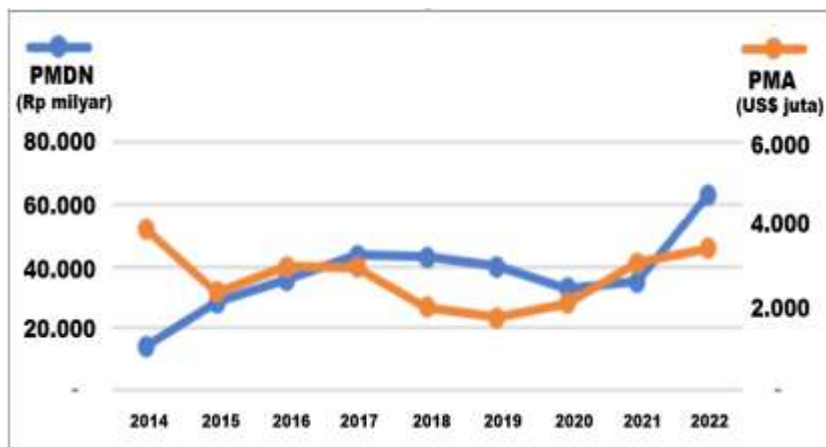
4.2. Investasi Hilirisasi Pertanian

Indonesia secara bertahap menggeser strategi dari hanya mengeksport bahan mentah pertanian ke mengembangkan industri pengolahan dan hilirisasi produk pertanian.

Sebagai program yang diprioritaskan dalam RPJMN 2020–2024 dan RPJMN 2025–2029, hilirisasi pertanian didukung dilaksanakan melalui pengembangan infrastruktur pengolahan, agroindustri, dan rantai nilai untuk komoditas pertanian utama, dengan dukungan investasi di pengolahan komoditas primer menjadi produk bernilai tinggi.

Perkembangan investasi pada sektor hilirisasi/industri hasil pertanian dapat dilihat pada grafik Gambar 7.4 (BKPM, dalam Kementerian Pertanian, 2023). Dinamika investasi industri hasil pertanian di Indonesia selama periode 2014–2022 yang ditandai oleh perbedaan pola antara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Meskipun ada pelemahan antara tahun 2018–2020, PMDN cenderung meningkat. Selama periode 2014–2022

PMDN tumbuh cepat (mencapai rata-rata 26,1% per tahun. Peningkatan PMDN ini mencerminkan penguatan peran investor domestik dalam pengembangan industri pengolahan hasil pertanian. Sementara itu, PMA relatif stagnan dan cenderung turun, bahkan nilai PMA pada 2022 masih lebih rendah dibandingkan tahun 2014.



Gambar 5. Perkembangan Investasi Industri Hasil Pertanian

Sumber: BKPM (2023) dalam Kinerja dan Prospek Investasi Pertanian, Kementerian Pertanian (2023)

Pada periode 2018–2020, kedua jenis investasi menunjukkan kecenderungan stagnasi bahkan pelemahan, yang dapat dikaitkan dengan meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, pelemahan harga komoditas pertanian internasional, dan diperparah oleh guncangan karena adanya pandemi COVID-19 pada 2020. Penurunan PMA yang lebih dalam dibandingkan PMDN menunjukkan bahwa investasi asing relatif lebih sensitif terhadap risiko global dan domestik. Sebaliknya, PMDN tampak lebih resilien, meskipun tetap mengalami koreksi, yang mencerminkan peran investasi domestik sebagai penyangga (buffer) bagi keberlanjutan pengembangan industri hilir pertanian.

Memasuki periode pemulihan 2021–2022, PMDN maupun PMA grafik memperlihatkan akselerasi investasi yang signifikan, terutama pada PMDN yang melonjak tajam pada 2022. Kenaikan ini sejalan dengan penguatan agenda hilirisasi pertanian, perbaikan iklim investasi, serta meningkatnya permintaan produk pangan olahan pasca-pandemi. PMA juga kembali meningkat, meskipun dengan laju yang lebih moderat, menandakan kembalinya kepercayaan investor asing terhadap prospek agroindustri Indonesia. Secara keseluruhan, Gambar 7.3 memberikan penegasan bahwa transformasi struktural berbasis hilirisasi pertanian di Indonesia semakin ditopang oleh investasi domestik, dengan PMA berperan sebagai pelengkap yang memperkuat kapasitas dan akses pasar global.

4.3. Kinerja Hilirisasi Pertanian

Kinerja hilirisasi pertanian di Indonesia menunjukkan kemajuan struktural yang semakin nyata dalam satu dekade terakhir, terutama melalui penguatan agroindustri sebagai tulang punggung transformasi ekonomi berbasis sumber daya domestik. Industri makanan dan minuman—yang merupakan bentuk utama hilirisasi hasil pertanian—secara konsisten menjadi subsektor manufaktur terbesar, dengan kontribusi lebih dari 35 persen terhadap PDB manufaktur nasional. Dalam skala ekonomi makro, agroindustri secara keseluruhan menyumbang sekitar 6–7 persen terhadap PDB nasional, menandakan bahwa proses penciptaan nilai tambah dari sektor

pertanian telah melampaui peran tradisionalnya sebagai penyedia bahan baku primer dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Temuan ini memperkuat argumen RPJMN 2025–2029 bahwa hilirisasi pertanian merupakan instrumen strategis untuk memperdalam struktur ekonomi nasional dan mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas mentah.

Dari sisi perdagangan internasional, kinerja hilirisasi pertanian tercermin jelas pada perubahan komposisi ekspor komoditas strategis. Sektor kelapa sawit merupakan contoh paling menonjol, di mana ekspor produk olahan—mulai dari CPO, oleokimia, hingga biodiesel—menyumbang lebih dari separuh devisa ekspor nonmigas sektor pertanian—perkebunan. Peningkatan kapasitas pengolahan domestik dan kebijakan pembatasan ekspor bahan mentah telah mendorong pergeseran nilai ekspor ke produk dengan kandungan teknologi dan nilai tambah yang lebih tinggi. Pola serupa juga terlihat pada komoditas kakao, di mana peningkatan rasio ekspor kakao olahan dibandingkan biji kakao mentah mencerminkan keberhasilan kebijakan industrialisasi berbasis sumber daya lokal, meskipun skalanya belum sebesar kelapa sawit. Secara agregat, tren ini menunjukkan bahwa hilirisasi pertanian telah berkontribusi langsung pada penguatan neraca perdagangan dan stabilitas eksternal ekonomi nasional.

Selain kontribusi terhadap PDB dan devisa, kinerja hilirisasi pertanian juga memiliki dimensi ketenagakerjaan yang strategis. Industri pengolahan berbasis pertanian menyerap jutaan tenaga kerja, terutama di wilayah perdesaan dan kota kecil, sehingga berperan penting dalam mengurangi kesenjangan wilayah dan mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif. Dibandingkan sektor produksi primer, agroindustri memiliki *multiplier effect* yang lebih tinggi terhadap penciptaan lapangan kerja, baik secara langsung di sektor pengolahan maupun secara tidak langsung melalui rantai pasok, logistik, dan jasa pendukung. Dengan demikian, hilirisasi pertanian tidak hanya meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga memperkuat fungsi sosial sektor pertanian sebagai penyangga kesempatan kerja nasional.

Namun demikian, capaian kinerja hilirisasi pertanian di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Konsentrasi nilai tambah yang tinggi pada beberapa komoditas besar—khususnya kelapa sawit—menunjukkan bahwa manfaat hilirisasi belum sepenuhnya terdistribusi secara merata antar subsektor dan wilayah. Hilirisasi komoditas pangan pokok, hortikultura, dan peternakan masih relatif tertinggal akibat keterbatasan infrastruktur pascapanen, skala usaha, akses pembiayaan, serta integrasi petani dan UMKM ke dalam rantai nilai industri. Oleh karena itu, ke depan, strategi hilirisasi pertanian perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan kontribusi makro, tetapi juga pada diversifikasi komoditas, pendalaman rantai nilai domestik, dan penguatan basis produksi rakyat, agar peran hilirisasi sebagai instrumen transformasi ekonomi benar-benar sejalan dengan agenda pembangunan inklusif dalam RPJMN 2025–2029 dan arah kebijakan RKP 2026.

4.4. Arah Hilirisasi Pertanian 2026

Memasuki tahun 2026, arah hilirisasi pertanian Indonesia semakin menegaskan pergeseran dari pendekatan berbasis komoditas primer menuju penguatan rantai nilai agroindustri yang terintegrasi. Perkembangan investasi beberapa tahun terakhir menunjukkan meningkatnya minat pada industri pengolahan pangan, bioindustri, dan produk turunan berbasis pertanian, namun dengan tingkat keterkaitan yang belum merata dengan basis produksi hulu. Oleh karena itu, hilirisasi pada 2026 diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan nilai tambah dan ekspor, tetapi juga untuk memperkuat struktur ekonomi domestik melalui penciptaan lapangan kerja, substitusi impor, dan penguatan pasar dalam negeri. Fokus kebijakan bergeser pada pengembangan produk antara dan akhir yang memiliki *market depth* kuat serta daya serap bahan baku lokal yang tinggi.

Pada saat yang sama, hilirisasi pertanian 2026 dituntut menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Tantangan utama yang masih mengemuka adalah keterbatasan partisipasi petani kecil dan pelaku UMKM dalam rantai nilai industri pengolahan, serta kesenjangan kapasitas antarwilayah. Untuk itu, arah kebijakan hilirisasi perlu ditopang oleh penguatan kelembagaan kemitraan hulu–hilir, modernisasi koperasi dan BUMDes pangan, serta penyediaan insentif yang mendorong *inclusive business model*. Hilirisasi juga semakin diintegrasikan dengan agenda keberlanjutan, termasuk efisiensi penggunaan sumber daya, pengurangan kehilangan pascapanen, dan pemenuhan standar lingkungan dan mutu pangan yang semakin ketat.

Lebih jauh, pada 2026 hilirisasi pertanian diposisikan sebagai bagian dari strategi transformasi ekonomi berbasis wilayah dan ketahanan nasional. Pengembangan klaster agroindustri berbasis komoditas unggulan daerah, didukung oleh infrastruktur logistik, energi, dan digitalisasi rantai pasok, menjadi instrumen utama untuk mengurangi ketimpangan spasial. Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, hilirisasi juga berperan sebagai mekanisme stabilisasi, dengan memperluas sumber nilai tambah domestik dan mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas mentah. Dengan arah tersebut, hilirisasi pertanian 2026 diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja sektor pertanian, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi dan daya saing Indonesia secara berkelanjutan.

V. Integrasi Petani, UMKM, dan Industri Pengolahan

5.1. Struktur Rantai Nilai Pertanian

Struktur rantai nilai pertanian di Indonesia umumnya terbagi dalam lima mata rantai utama, yaitu penyediaan input produksi, kegiatan budidaya di tingkat petani, penanganan pascapanen dan pengolahan awal, pengolahan lanjutan dan distribusi, serta pemasaran ke konsumen akhir. Pada sebagian besar komoditas pangan dan perkebunan strategis, nilai tambah masih terkonsentrasi pada mata rantai hilir, terutama pada tahap pengolahan lanjutan, distribusi, dan pemasaran. Sementara itu, petani sebagai pelaku utama di hulu masih menghadapi keterbatasan dalam akses terhadap teknologi, pembiayaan, dan informasi pasar, sehingga posisi tawar mereka dalam rantai nilai relatif lemah. Kondisi ini menjelaskan mengapa peningkatan produksi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan petani.

Dari perspektif kelembagaan dan struktur pasar, rantai nilai pertanian Indonesia ditandai oleh fragmentasi pelaku usaha dan dominasi aktor perantara pada tahap pascapanen dan distribusi. Skala usaha petani yang kecil dan tersebar menyebabkan efisiensi logistik rendah dan biaya transaksi tinggi, terutama pada komoditas pangan segar dan hortikultura. Dalam banyak kasus, keterhubungan antara petani, UMKM pengolahan, dan industri skala besar belum terbangun secara sistematis, sehingga aliran bahan baku dan informasi harga tidak berlangsung secara optimal. Akibatnya, integrasi vertikal dan horizontal dalam rantai nilai masih terbatas, yang berdampak pada rendahnya daya saing produk pertanian domestik di pasar nasional maupun global.

Dalam konteks transformasi ekonomi, penguatan struktur rantai nilai pertanian menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan hilirisasi dan peningkatan inklusivitas pembangunan. Upaya perbaikan rantai nilai perlu difokuskan pada penguatan posisi petani melalui konsolidasi usaha, kemitraan berbasis kontrak, dan integrasi dengan UMKM serta industri pengolahan. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur pascapanen, sistem logistik, dan pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci untuk menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan transparansi pasar. Dengan struktur rantai nilai yang lebih terintegrasi dan efisien, pertanian tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan lebih efektif dalam peningkatan kesejahteraan petani

dan pembangunan wilayah, sejalan dengan arah kebijakan RPJMN 2025–2029 dan agenda pembangunan 2026.

5.2. Model Integrasi dan Pembelajaran Internasional

Model Integrasi antara petani, UMKM, dan industri pengolahan merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan efisiensi rantai nilai pertanian sekaligus memperluas distribusi nilai tambah. Dalam struktur ekonomi pertanian Indonesia, petani dan UMKM berperan dominan pada tahap produksi dan pengolahan awal, sementara industri skala menengah dan besar menguasai pengolahan lanjutan serta akses pasar. Ketidakterhubungan yang memadai antar pelaku tersebut menyebabkan rantai pasok tidak optimal, baik dari sisi kontinuitas pasokan bahan baku, kualitas produk, maupun stabilitas harga. Oleh karena itu, penguatan integrasi vertikal menjadi instrumen kebijakan penting untuk menjembatani kesenjangan skala usaha dan meningkatkan daya saing sektor pertanian secara keseluruhan.

Secara operasional, integrasi rantai nilai dapat dilakukan melalui pengembangan skema kemitraan usaha yang saling menguntungkan, seperti *contract farming*, *off-taker system*, dan koperasi modern berbasis korporasi petani. Melalui mekanisme ini, petani memperoleh kepastian pasar, akses pembiayaan, serta transfer teknologi dan standar mutu, sementara industri pengolahan mendapatkan jaminan pasokan bahan baku yang berkelanjutan dan berkualitas. UMKM pengolahan berperan sebagai penghubung antara hulu dan hilir, khususnya dalam kegiatan sortasi, pengolahan antara, dan penyediaan produk setengah jadi. Pengalaman pada komoditas perkebunan ekspor dan beberapa subsektor pangan menunjukkan bahwa integrasi yang dirancang secara institusional mampu menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi produksi.

Dalam perspektif kebijakan pembangunan, integrasi petani, UMKM, dan industri pengolahan perlu didukung oleh kerangka regulasi dan insentif yang konsisten lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan. Dukungan tersebut mencakup penguatan kelembagaan ekonomi petani, fasilitasi pembiayaan rantai nilai, penyediaan infrastruktur logistik dan pascapanen, serta pemanfaatan sistem digital untuk ketertelusuran (*traceability*) dan transparansi harga. Integrasi yang efektif tidak hanya meningkatkan kinerja hilirisasi pertanian, tetapi juga memperkuat inklusivitas pembangunan dengan memastikan bahwa petani dan UMKM menjadi bagian integral dari proses penciptaan nilai tambah. Arah kebijakan ini sejalan dengan mandat RPJMN 2025–2029 dan RKP 2026 yang menekankan penguatan ekosistem agribisnis dan agroindustri berbasis wilayah.

VI. Sintesi Analisis dan Rekomendasi Strategis

6.1. Sintesi Analisis

Komoditas pangan dan perkebunan memiliki peran strategis dan multidimensi dalam pembangunan ekonomi Indonesia, mencakup kontribusi terhadap pertumbuhan PDB, stabilitas makroekonomi, ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan basis industri nasional. Sektor pertanian dan agroindustri tidak lagi semata berfungsi sebagai penyedia bahan baku, tetapi telah berkembang menjadi penggerak nilai tambah dan transformasi struktural, khususnya melalui hilirisasi dan penguatan industri makanan dan minuman. Namun demikian, kontribusi tersebut masih menghadapi tantangan struktural berupa produktivitas yang relatif rendah di tingkat hulu, volatilitas harga pangan strategis, serta ketimpangan distribusi nilai tambah dalam rantai nilai pertanian.

Dari perspektif stabilitas makroekonomi, analisis menunjukkan bahwa pangan—terutama komoditas strategis seperti beras, gula, minyak goreng, dan komoditas hortikultura—memiliki pengaruh signifikan terhadap inflasi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Peran Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID) terbukti semakin relevan dalam meredam volatilitas harga melalui koordinasi kebijakan pasokan, distribusi, dan intervensi pasar. Meski demikian, efektivitas pengendalian inflasi pangan masih sangat bergantung pada kapasitas daerah, ketersediaan cadangan pangan, serta kualitas data dan sistem peringatan dini (*early warning system*).

Dalam konteks hilirisasi, temuan utama Bab 7 mengindikasikan bahwa Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan pada komoditas tertentu—terutama kelapa sawit dan sebagian komoditas perkebunan ekspor—namun masih tertinggal pada hilirisasi pangan pokok dan hortikultura. Kinerja hilirisasi yang timpang ini berimplikasi pada terbatasnya diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi dan masih rendahnya keterlibatan petani serta UMKM dalam rantai nilai bernilai tambah tinggi. Oleh karena itu, hilirisasi perlu dipahami bukan hanya sebagai agenda industrialisasi, tetapi sebagai instrumen integrasi hulu–hilir yang menentukan kualitas pertumbuhan dan inklusivitas pembangunan.

6.2. Isu Strategis Utama

Berdasarkan sintesis analisis data, literatur, dan benchmarking kebijakan, terdapat empat isu strategis utama yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan sektor pangan dan pertanian ke depan:

1. **Produktivitas dan ketahanan sistem produksi pangan masih menjadi prasyarat utama bagi stabilitas pasokan dan harga.** Peningkatan produktivitas memungkinkan efisiensi penggunaan lahan dan biaya, sementara ketahanan sistem memastikan ketersediaan pangan meski terjadi guncangan eksternal seperti perubahan iklim atau krisis global. Keduanya saling melengkapi dalam menciptakan pasokan yang konsisten, sehingga harga pangan tetap terkendali dan tidak memicu inflasi. Dengan demikian, stabilitas pangan menjadi landasan penting bagi kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi nasional.
2. **Volatilitas harga pangan strategis terus menjadi sumber tekanan inflasi dan kerentanan sosial.** Volatilitas harga pangan strategis menciptakan tekanan inflasi yang signifikan karena komoditas pangan memiliki bobot besar dalam pengeluaran rumah tangga. Ketika harga berfluktuasi tajam, daya beli masyarakat melemah dan kelompok rentan paling terdampak, sehingga memicu kerentanan sosial. Kondisi ini juga dapat memperburuk ketidakstabilan ekonomi, menimbulkan keresahan, dan meningkatkan risiko ketidakamanan pangan. Oleh karena itu, pengendalian volatilitas harga pangan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi kesejahteraan masyarakat.
3. **Hilirisasi pertanian belum merata antar komoditas dan wilayah, dengan dominasi komoditas tertentu.** Hilirisasi pertanian di Indonesia masih menghadapi tantangan karena belum merata antar komoditas maupun wilayah, dengan kecenderungan dominasi pada komoditas tertentu seperti kelapa sawit atau padi. Ketimpangan ini membuat nilai tambah dari sektor pertanian belum optimal, terutama bagi komoditas lain yang berpotensi besar namun kurang mendapat perhatian. Akibatnya, distribusi manfaat ekonomi tidak seimbang dan wilayah dengan komoditas unggulan lebih maju dibanding daerah lain. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang mendorong diversifikasi hilirisasi agar seluruh komoditas dan wilayah dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi secara lebih inklusif.

4. **Integrasi petani, UMKM, dan industri pengolahan masih lemah, sehingga distribusi manfaat ekonomi belum optimal.** Lemahnya integrasi antara petani, UMKM, dan industri pengolahan menyebabkan rantai nilai pertanian belum berjalan secara efisien. Kondisi ini membuat petani sering hanya menikmati keuntungan minimal, sementara nilai tambah lebih banyak terserap di tingkat pengolahan atau distribusi. Akibatnya, manfaat ekonomi tidak terdistribusi secara merata dan potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa belum optimal. Penguatan kolaborasi dan kemitraan antar pelaku menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem pertanian yang inklusif dan berkelanjutan.

Isu-isu tersebut saling terkait dan menuntut pendekatan kebijakan yang terintegrasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pelaku usaha.

6.3. Rekomendasi Strategis

Dari berbagai analisis empiris dan konseptual mengenai **peran komoditas strategis dan hilirisasi pertanian di Indonesia**, dengan mengaitkannya secara eksplisit pada tantangan struktural, bukti data (PDB, TFP, investasi), serta arah kebijakan nasional (RPJMN dan agenda transformasi ekonomi), dapat disampaikan rekomendasi strategis dan implikasi kebijakan sebagai berikut.

1. **Pertama, memperkuat fondasi produksi dan ketahanan pangan.**

Peningkatan produktivitas pertanian melalui adopsi teknologi, penguatan infrastruktur irigasi dan pascapanen, serta perbaikan tata kelola input produksi menjadi agenda mendasar. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa stabilitas harga dan hilirisasi tidak dibangun di atas basis produksi yang rapuh.

2. **Kedua, meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi pangan berbasis wilayah.**

Peran TPID perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan daerah, pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah, serta integrasi data produksi, distribusi, dan harga dalam satu sistem nasional. Pendekatan berbasis wilayah (*place-based policy*) menjadi kunci untuk merespons heterogenitas kondisi antarprovinsi.

3. **Ketiga, mendorong hilirisasi pertanian yang lebih terdiversifikasi dan inklusif.**

Kebijakan hilirisasi perlu diarahkan tidak hanya pada komoditas ekspor unggulan, tetapi juga pada pangan pokok dan hortikultura, dengan fokus pada penciptaan nilai tambah domestik dan penyerapan tenaga kerja. Insentif fiskal, pembiayaan, dan pengembangan kawasan industri berbasis pertanian perlu diselaraskan dengan potensi wilayah.

4. **Keempat, mempercepat integrasi petani, UMKM, dan industri pengolahan.**

Penguatan kelembagaan ekonomi petani, pengembangan skema kemitraan usaha, serta fasilitasi pembiayaan rantai nilai menjadi instrumen kunci untuk memastikan petani dan UMKM terlibat aktif dalam proses hilirisasi. Integrasi ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku hulu sekaligus menjamin keberlanjutan pasokan bagi industri.

Penutup

Secara keseluruhan, pembangunan komoditas strategis dan hilirisasi pertanian bukan hanya sebagai instrumen stabilisasi jangka pendek, namun merupakan pilar penting agenda transformasi ekonomi Indonesia dalam jangka menengah-panjang menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045. Keberhasilan agenda ini sangat bergantung pada kemampuan negara meningkatkan produktivitas hulu, membangun keterkaitan nilai tambah yang inklusif, serta menciptakan kepastian kebijakan bagi pelaku usaha dan petani. Tanpa fondasi produktivitas dan

tata kelola yang kuat, hilirisasi justru berisiko memperdalam dualisme antara sektor primer dan industri pengolahan. Oleh karena itu, peran negara perlu diarahkan sebagai koordinator strategis yang menyelaraskan kebijakan pangan, industri, investasi, dan pembangunan wilayah secara konsisten. Dengan pendekatan tersebut, komoditas strategis dapat berfungsi tidak hanya sebagai penopang ketahanan pangan, tetapi juga sebagai motor pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan.

Referensi

- Bappenas. (2025). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Bappenas. (2025). *Rencana Kerja Pemerintah 2026*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Bank Indonesia. (2022). *Inflation dynamics and food price volatility in Indonesia*. Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2023). *Inflasi Pangan dan Stabilitas Makroekonomi*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Statistik Indonesia 2021*. BPS-Statistics Indonesia.
- BPS. (2024). *Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2015–2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2024). *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Dawe, D., C. P. Timmer & P. Dorosh. (2020). Rice price stabilization in Asia: What have we learned? *Food Policy*, 98, 101888.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2021). *The state of food and agriculture 2021: Making agrifood systems more resilient to shocks and stresses*. FAO.
- FAO. (2022). *The State of Food Security and Nutrition in the World*. Rome: FAO.
- FAO, IFAD, UNICEF, WFP, & WHO. (2023). *Regional Overview of Food Security and Nutrition in Asia and the Pacific*. Rome.
- Hayami, Y., & Ruttan, V. W. (1985). *Agricultural Development: An International Perspective*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- International Monetary Fund. (2023). *World economic outlook: Navigating global divergences*. IMF.
- Johnston, B. F., & Mellor, J. W. (1961). The role of agriculture in economic development. *American Economic Review*, 51(4), 566–593.
- Kementerian Pertanian. (2023). *Kinerja dan Prospek Investasi Pertanian*. Pertanian Press. Jakarta. [View view of the file 978-9879-582-246-2.pdf](#).
- Nurhayati, A., & Suryana, Y. (2021). Hilirisasi Produk Pertanian sebagai Upaya Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing (Studi pada Komoditas Pangan). *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 9(2), 145–156.
- OECD. (2021). *Making Global Value Chains Work for Development*. Paris: OECD Publishing.
- OECD–FAO. (2023). *Agricultural Outlook 2023–2032*. Paris/Rome.
- Pingali, P., Mittra, B., & Rahman, A. (2017). The bumpy road from food to nutrition security – slow evolution of India’s food policy. *Global Food Security*, 15, 77–84.

- Pramono, A., & Anggraeni, D. (2020). Peran Hilirisasi Agro dalam Meningkatkan Kinerja Industri Pengolahan di Indonesia. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, 17(1), 75–91.
- Reardon, T., Echeverria, R., Berdegue, J., Minten, B., Liverpool-Tasie, S., Tschirley, D., & Zilberman, D. (2019). Rapid transformation of food systems in developing regions: highlighting the role of agricultural research & innovations. *World Development*, 115, 1–15.
- Timmer, C. P. (2009). *A world without agriculture: The structural transformation in historical perspective*. American Enterprise Institute Press.
- Timmer, C. P. (2015). *Food security and scarcity: Why ending hunger is so hard*. University of Pennsylvania Press.
- Timmer, C. P. (2017). *Food Security and Scarcity: Why Ending Hunger Is So Hard*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- World Bank. (2020). *World development report 2020: Trading for development in the age of global value chains*. World Bank.
- World Bank. (2022). *Transforming Agriculture for Inclusive Growth*. Washington, DC.
- World Bank. (2023). *Indonesia Economic Prospects: Investing for Growth*. Washington, DC.
- World Bank. (2022). *Commodity markets outlook: The impact of the war in Ukraine on commodity markets*. World Bank.